PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG



RINGKASAN

RPJMD

Kabupaten Sintang

tahun 2025-2029

BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



GREGORIUS HERKULANUS BALA
BUPATI SINTANG

RPJMD Kabupaten Sintang 2025–2029 merupakan arah pembangunan Kabupaten Sintang untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menggambarkan kondisi saat ini, potensi yang dapat dikembangkan, tantangan yang harus dihadapi hingga arah kebijakan pembangunan yang disepakati. Seluruhnya dijawab melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan sasaran dan target pembangunan yang terukur. RPJMD menjadi pegangan bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan.

RPJMD ini adalah janji politik kami, yang merupakan perwujudan mimpi, hasrat dan cita-cita untuk membangun Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera Berkualitas Dan Berkelanjutan. Saya mengajak semua komponen masyarakat Kabupaten Sintang secara bersama-sama mewujudkan RPJMD ini. Karena RPJMD ini adalah milik kita semua. Ingatlah, masa depan tidak hanya terletak pada pekerjaan, tetapi pada orang yang mengerjakan.



FLORENSIUS RONNY
WAKIL BUPATI SINTANG



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
Kepala Bappeda Kabupaten Sintang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb, salam sejahtera

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Kabupaten Sintang telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan.

Booklet ini disusun untuk menghadirkan ringkasan RPJMD dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Melalui uraian singkat ini, masyarakat dapat melihat gambaran mengenai kondisi daerah, isu-isu strategis, visi dan misi Kepala Daerah, hingga target pembangunan yang ditetapkan.

Kami berharap booklet ini dapat menjadi jendela bagi seluruh pihak untuk memahami arah pembangunan Sintang. Dengan demikian, kerja sama dan partisipasi berbagai elemen masyarakat dapat terus terjalin demi terwujudnya Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera, maju, dan berkelanjutan.

Sintang, 20 Agustus 2025

DAFTAR ISI

SEKILAS RPJMD 1

GAMBARAN UMUM DAERAH 6

VISI, MISI, TUJUAN & PROGRAM PRIORITAS 21

KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH 32

01

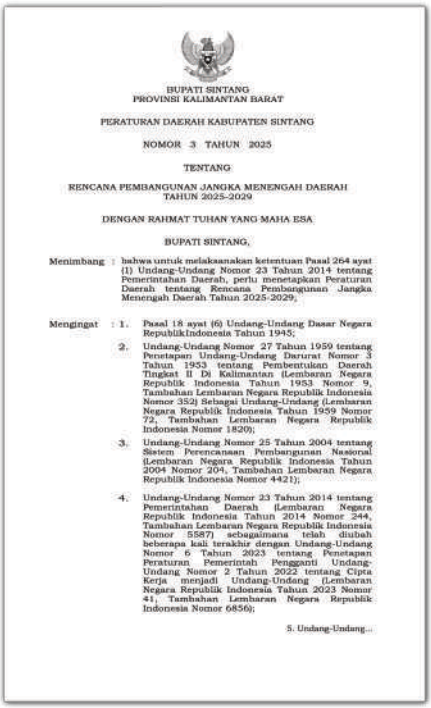
SEKILAS RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun, sesuai dengan periode jabatan kepala daerah. Kedudukan dokumen RPJMD diatur dalam undang-undang, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai pedoman pembangunan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan sekaligus sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2025

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SINTANG,

GREGORIUS HERKULANUS BALA

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

MARKUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3 / 2025)

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Sintang, menyesuaikan dengan RPJMN, serta memperhatikan konsistensi dengan RTRW Kabupaten Sintang. Hubungan ini memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Sintang berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.

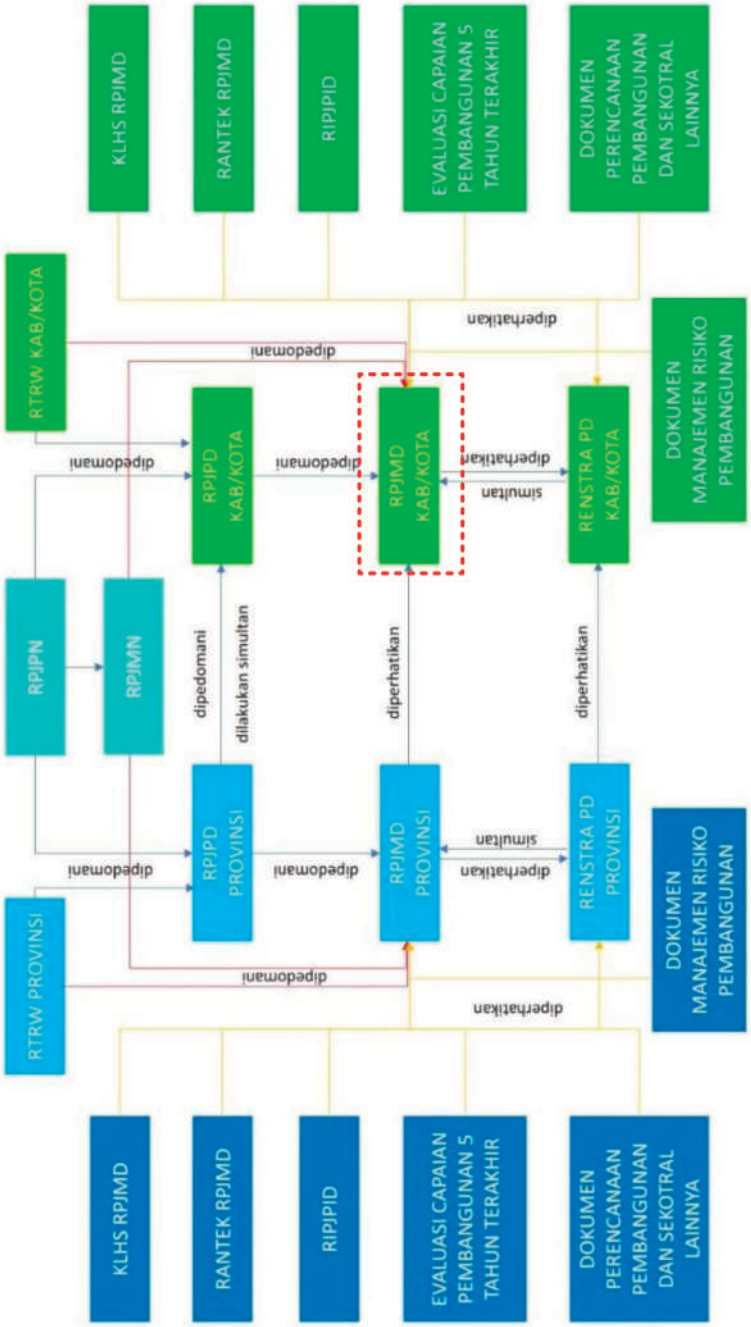
RPJMD memuat penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD menjadi instrumen yang menghubungkan gagasan politik kepala daerah dengan perencanaan teknokratis yang dapat diukur pencapaiannya.

RPJMD juga menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja masing-masing. Setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus selaras dengan RPJMD agar pelaksanaan pembangunan berjalan konsisten dan terkoordinasi.

Sebagai dokumen pembangunan, RPJMD memuat prioritas pembangunan daerah, target yang ingin dicapai, dan indikator kinerja utama. Hal ini memungkinkan adanya evaluasi dan pengendalian pembangunan secara periodik, sehingga hasilnya dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Proses diawali dengan evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya, diikuti dengan identifikasi permasalahan dan isu strategis, penjabaran visi-misi kepala daerah, hingga penyusunan rancangan awal. Tahap berikutnya adalah konsultasi publik, pembahasan bersama DPRD, dan penetapan menjadi Peraturan Daerah. Proses ini menunjukkan bahwa RPJMD merupakan hasil dari mekanisme formal dan partisipatif.

Keterkaitan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029



Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
22 Februari - 10 Maret 2025

Konsutlasi Publik Rancangan Awal RPJMD
12 Maret 2025

Pembahasan (Rapat kerja) Dengan DPRD
17 Maret 2025

Penandatangaan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD
21 Maret 2025

Konsultasi ke Gubernur Kalimantan Barat
26 Maret 2025

Penyusunan Renstra OPD
17 Maret 2025

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD
11 April 2025

Penetapan RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029
20 Agustus 2025

Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
19 September 2025

02
GAMBARAN UMUM DAERAH



Aspek Geografi dan Demografi

Ibu Kota Kabupaten : Sintang

Posisi : 1°05' LU serta 0°46' LS dan 110°50' BB serta 113°20' BT



Luas Wilayah : 21.196,73 km²

Jumlah Kecamatan : 14 Kecamatan

Jumlah Kelurahan/Desa : 16 Kelurahan, 391 Desa

Batas Wilayah :

Utara	:	Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Sarawak)
Selatan	:	Prov. Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang
Timur	:	Prov. Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu
Barat	:	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau

Secara geografis, Kabupaten Sintang memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik topografi beragam, mulai dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan. Posisi Sintang sebagai daerah hulu dengan aliran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi menjadikan wilayah ini strategis, sekaligus menghadirkan tantangan dalam konektivitas antarwilayah.

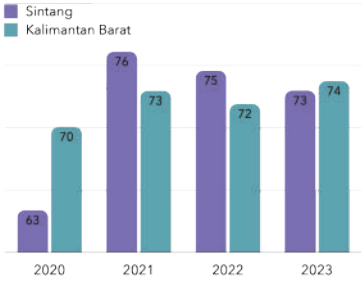
Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Sintang terus mengalami pertumbuhan. Struktur penduduk yang didominasi kelompok usia produktif menjadi peluang dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun pada saat yang sama memerlukan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai.

1. Potensi Sumber Daya Alam

- ▶ Tanaman pangan dan holtikultura : **Padi, Jagung**
- ▶ Perkebunan : **Sawit**
- ▶ Sayuran : **Cabe Rawit, Ketimun**
- ▶ Buah : **Durian, Jeruk, Mangga, Pepaya, Pisang**
- ▶ Perikanan, Peternakan dan Kehutanan

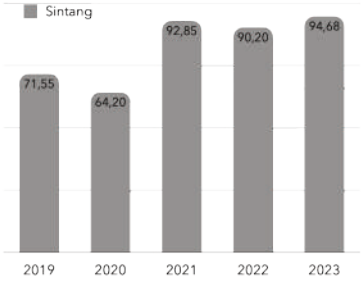
2. Lingkungan Hidup dan Energi

▶ Indeks Lingkungan Hidup



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang mengalami penurunan karena alih fungsi lahan yang terjadi dengan masif.

▶ Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik



Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik mengindikasikan upaya pemerataan energi hingga desa.

3. Resilensi Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Cuaca Ekstrem	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
Gempa Bumi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
Karhutla	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Kekeringan	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

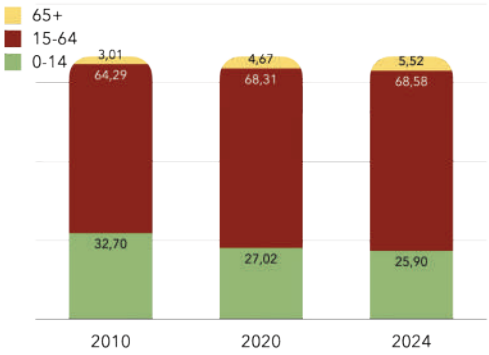
*Pada tahun 2024, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sintang berada pada posisi **123,96** poin, dengan kelas risiko **Sedang**.*

4. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 421.306 jiwa. Empat tahun kemudian, menurut estimasi BPS berdasarkan hasil SP 2020, penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2024 berjumlah 443.684 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Sintang tergolong rendah, yakni 1,30 persen. LPP tertinggi terjadi di Kecamatan Sintang (2,45%). LPP terendah terjadi di Kecamatan Ambalau.

Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut Dependency Ratio (DR) atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 55,55 tahun 2010 menjadi 46,39 tahun 2020, dan semakin mengecil hingga mencapai 45,82 di tahun 2024. Angka DR kurang dari 50 menandakan Kabupaten Sintang telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (*gold opportunity*) bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

▶ Struktur Penduduk (%) dan *Dependency Ratio (DR)*



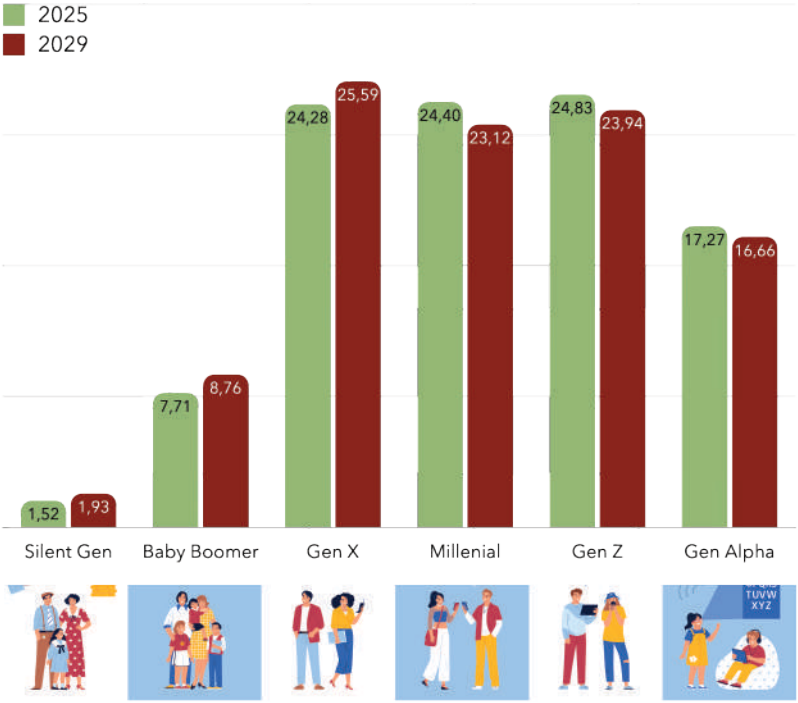
DR (2010)
55,55

DR (2020)
46,39

DR (2024)
45,82

▶ Distribusi Penduduk Menurut Generasi

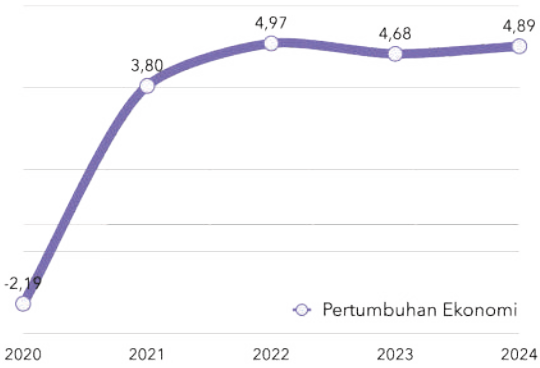
Proyeksi penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2029 masih didominasi oleh Gen X, Millenial dan Gen z, seperti tahun 2025.



Aspek Kesejahteraan Masyarakat

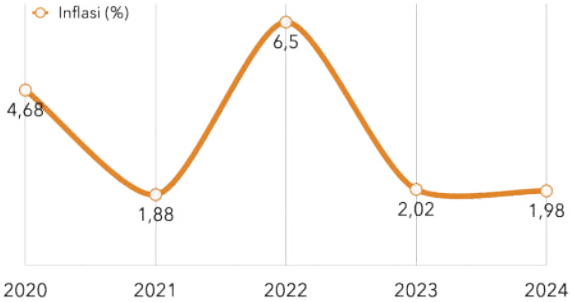
Aspek ini memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat dari indikator–indikator makroekonomi daerah yang secara umum dapat dilihat dari capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka hingga perlindungan sosial. .Secara ekonomi, perekonomian Kabupaten Sintang ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa. Meski demikian, ketergantungan pada komoditas tertentu membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga global.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)



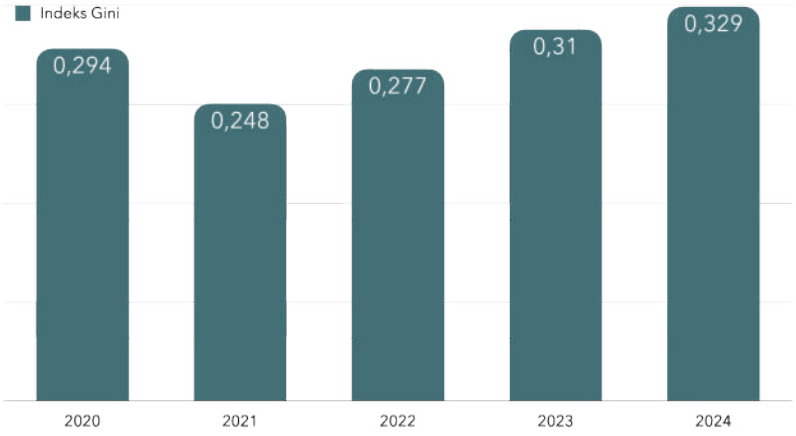
Pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif. Pola tren ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan barat hingga nasional. Adapun sektor yang konsisten mengalami peningkatan yaitu Sektor Jasa.

2. Laju Inflasi



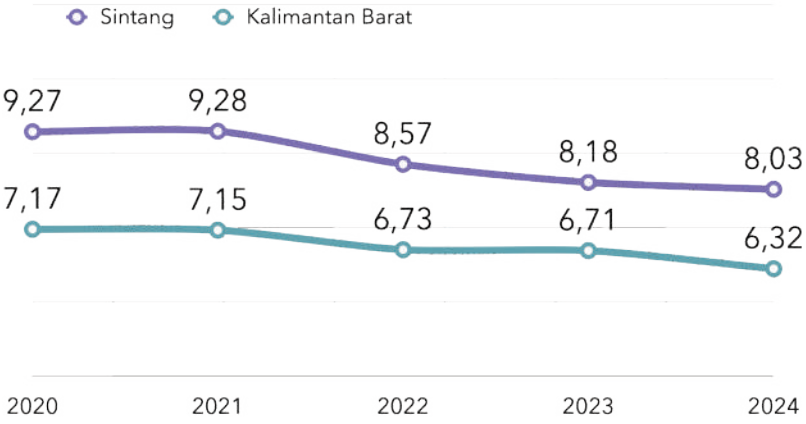
Dalam lima tahun terakhir, inflasi di Kabupaten Sintang relatif terkendali. Hal ini mengindikasikan daya beli masyarakat yang cukup stabil.

3. Indeks GIni



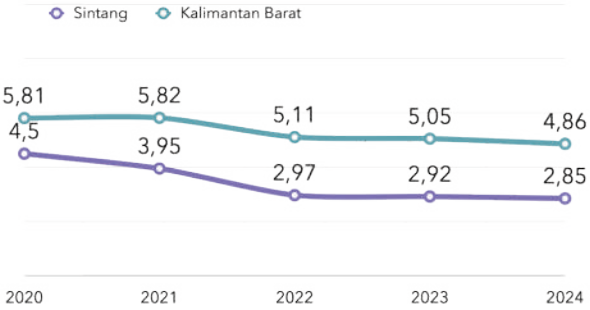
Indeks Gini menjadi salah satu alat ukur ketimpangan pendapatan relatif antar masyarakat di suatu wilayah. Rata-rata Indeks Gini Kabupaten Sintang berkisar antara 0,2 hingga 0,35 menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata.

4. Angka Kemiskinan (%)



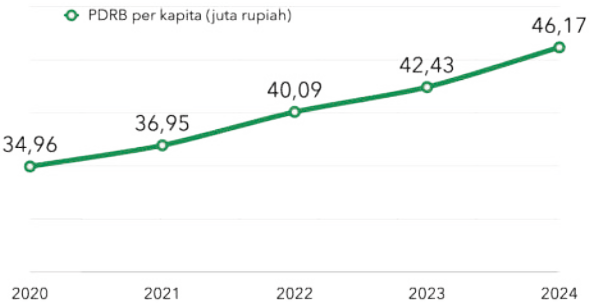
Angkia kemiskinan di Kabupaten Sintang masih tergolong tinggi, yaitu posisi kelima tertinggi di Kalimantan Barat.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



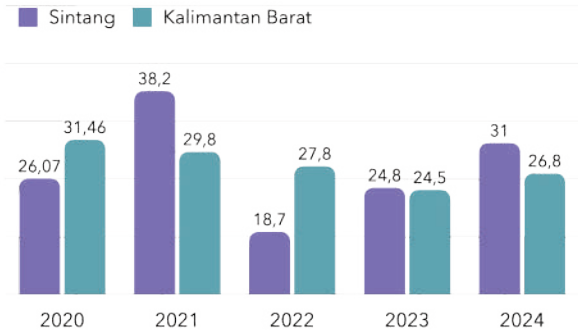
TPT Kabupaten Sintang menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir, dan juga lebih rendah dari rata-rata Kalimantan Barat.

6. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita



PDRB per kapita dengan pola peningkatan rata-rata hingga 5,10% mengindikasikan upaya yang berjalan baik dalam menjaga LPE lebih tinggi dari LPP

7. Prevalensi Stunting

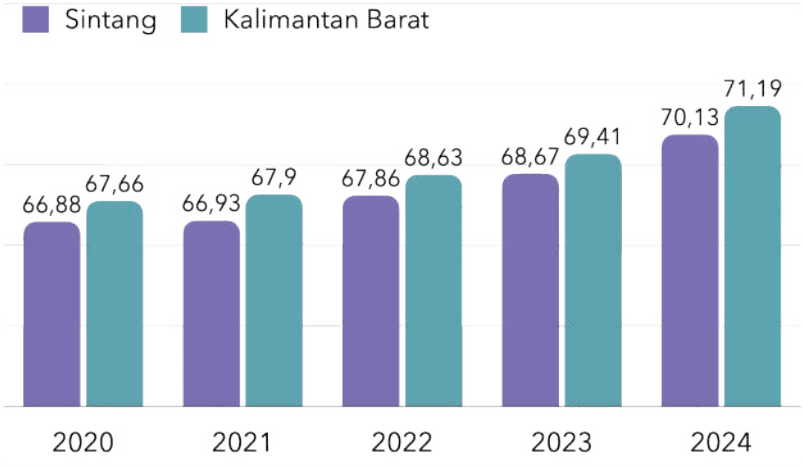


Prevalensi stunting di Kabupaten Sintang relatif tidak stabil atau turun naik. Sementara secara rata-rata provinsi terjadi tren penurunan prevalensi stunting

Aspek Daya Saing Daerah

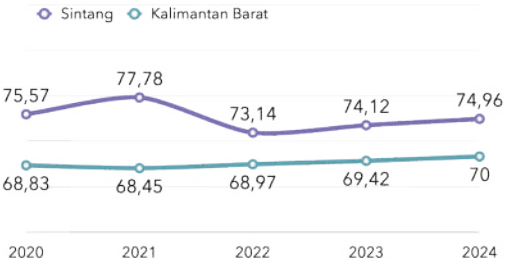
Pada aspek daya saing, pembangunan Sumber Daya Manusia beserta segala hal pendukung menjadi ukuran potensi daerah untuk bersaing secara global. Pembangunan manusia, ketenagakerjaan hingga infrastruktur dasar menunjukkan perkembangan positif meskipun kualitas dan pemerataan menjadi tantangan utama.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



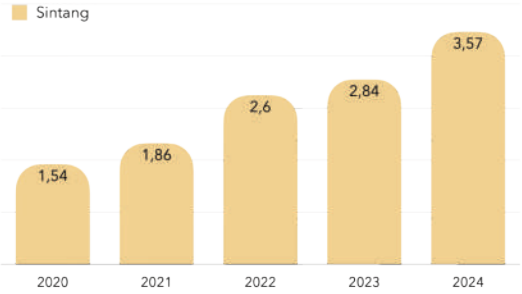
IPM Kabupaten Sintang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun indikator Rata-Rata Lama Sekolah bergerak lebih lambat daripada indikator lainnya.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)



TPAK Kabupaten Sintang saat ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat.

3. Indeks Daya Saing Daerah



Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sintang mengalami peningkatan rata-rata 0,5 poin per tahun.

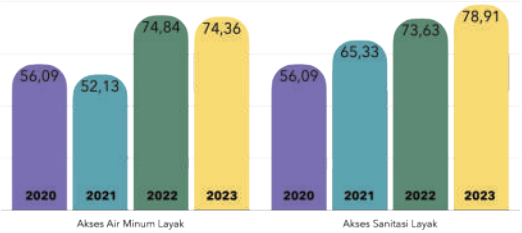
Dalam bidang infrastruktur, aksesibilitas jalan, jembatan, serta sarana komunikasi menjadi fokus penting untuk memperkuat konektivitas wilayah. Indeks infrastruktur menurun, akses rumah tangga terhadap air minum layak dan sanitasi layak meningkat dan kondisi jalan kabupaten yang mantap juga meningkat.

4. Indeks Infrastruktur



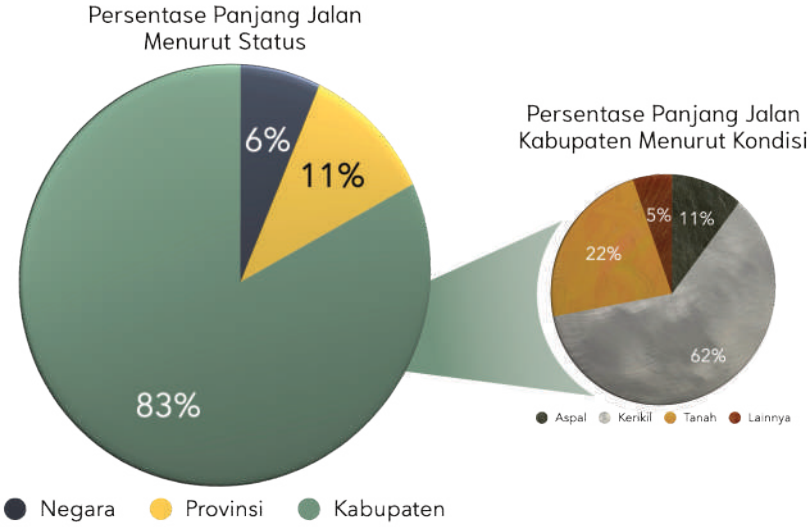
Alih fungsi lahan berkontribusi besar terhadap penurunan indeks infrastruktur Kabupaten Sintang.

5. Sanitasi dan Air Bersih



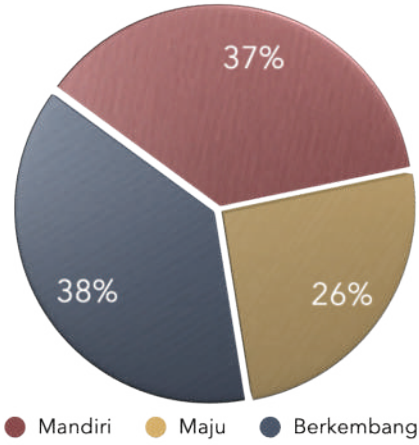
Kedua indikator disamping menunjukkan perkembangan positif dalam periode 2020 hingga 2024.

6. Kondisi Jalan



Dari total panjang jalan di Kabupaten Sintang tahun 2024 yaitu 2.163,75 km, panjang jalan dengan status jalan kabupaten yaitu 1.787,96 km atau 83%. Selanjutnya, kondisi jalan kabupaten tersebut sebagian besar adalah kerikil yaitu 62%.

7. Persentase Desa Mandiri



Pada tahun 2025, tidak ada lagi desa di Kabupaten Sintang dengan status Desa Tertinggal maupun Desa Sangat Tertinggal. Tercatat bahwa terdapat 143 Desa Mandiri (37%), 100 Desa Maju (26%) dan 147 Desa Berkembang (38%).

Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan kepada publik telah dilaksanakan dengan optimal. Indeks Reformasi Birokrasi naik menjadi predikat Baik. Indeks SPBE naik dari predikat Kurang menjadi Cukup. Indeks Pelayanan Publik mencapai peringkat A pada tahun 2024. Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil mempertahankan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Opini BPK.

1. Indeks Reformasi Birokrasi



CC (2021) → CC (2022) → B (2023) → B (2024)

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



K (1,51) 2021 → K (1,03) 2022 → C (1,89) 2023 → C (2,30) 2024

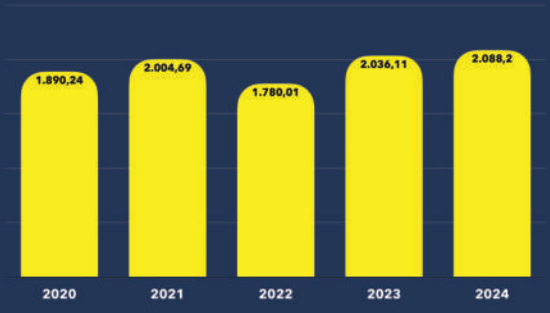
3. Indeks Pelayanan Publik



B- (2021) → B- (2022) → B (2023) → A (2024)

Gambaran Keuangan Daerah

APBD Kabupaten Sintang (miliar rupiah)

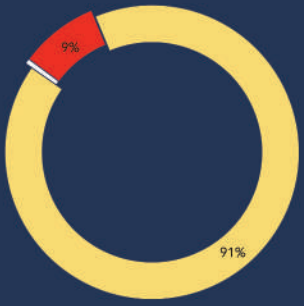


Rata-rata pertumbuhan

2,62%

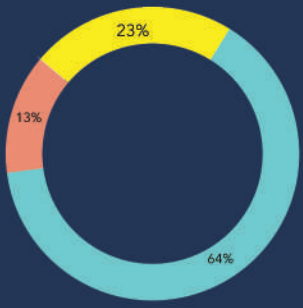
per tahun

Realisasi Pendapatan Daerah (2024)



Pendapatan Asli Daerah Rp.179,04 miliar	9%
Pendapatan Transfer Rp.1.8999,12 miliar	91%
Lainnya Pendapatan yang Sah Rp.10,03 miliar	0,5%

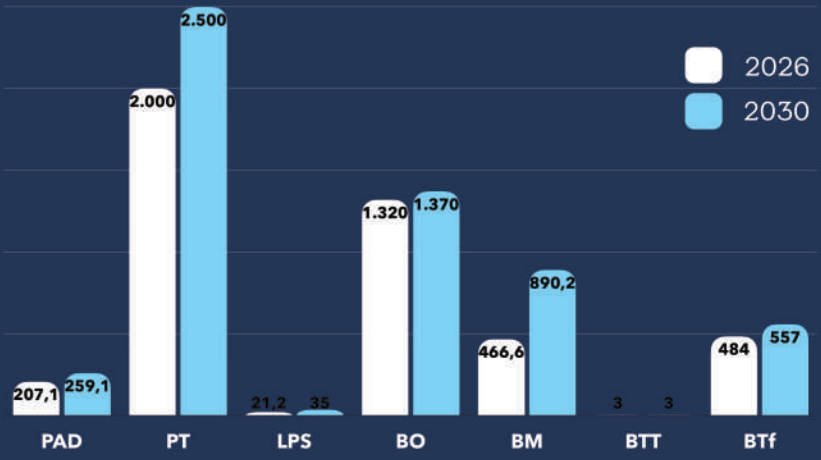
Realisasi Belanja Daerah (2024)



Belanja Operasi Rp.1.344,05 miliar	64%
Belanja Modal Rp.277,8 miliar	13%
Belanja Transfer Rp.475,35 miliar	23%
Belanja Tak Terduga Rp.912,9 juta	0,04%

Proyeksi APBD Tahun 2026-2030

berdasarkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang bertumbuh rata-rata sebesar 3.13% per tahun



PAD = Pendapatan Asli Daerah
PT = Pendapatan Transfer
LPS = Lainnya Pendapatan yang Sah
BO = Belanja Operasi
BM = Belanja Modal
BTT = Belanja Tak terduga
BTF = Belanja Transfer

Alternatif Pendanaan Pembangunan melalui Corporate Social Resposibility (CSR)



Pada tahun 2024, tercatat CSR sebagai kontribusi dari:

- **41** Perusahaan Perkebunan
- **3** Bank
- **1** BUMN
- **1** BUMD
- **4** CU
- **41** Mitra Pembangunan

9 Isu Strategis Pembangunan

1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan yang terintegrasi dan terstandarisasi

2. Belum terwujudnya akselerasi transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur TIK yang merata, peningkatan literasi digital, dan optimalisasi teknologi untuk pelayanan publik dan ekonomi digital



3. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan dan penguatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang

4. Belum optimalnya transformasi ekonomi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

5. Belum tercapainya kemandirian pangan daerah

6. Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter dan belum tuntasnya pengentasan kemiskinan

7. Belum optimalnya pelestarian budaya, kearifan lokal, kerukunan bermasyarakat

8. Belum optimalnya penyelengaraan tata kelola pemerintahan

9. Belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup pada seluruh aspek untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana

03

VISI, MISI, TUJUAN & PROGRAM PRIORITAS



VISI

RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025-2029

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN



MISI

RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025-2029

1



Meningkatkan infrastruktur dasar sehingga terciptanya konektivitas antar wilayah berdasarkan perencanaan tata ruang

2

Mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas ketersediaan pangan serta optimalisasi pendapatan daerah



3



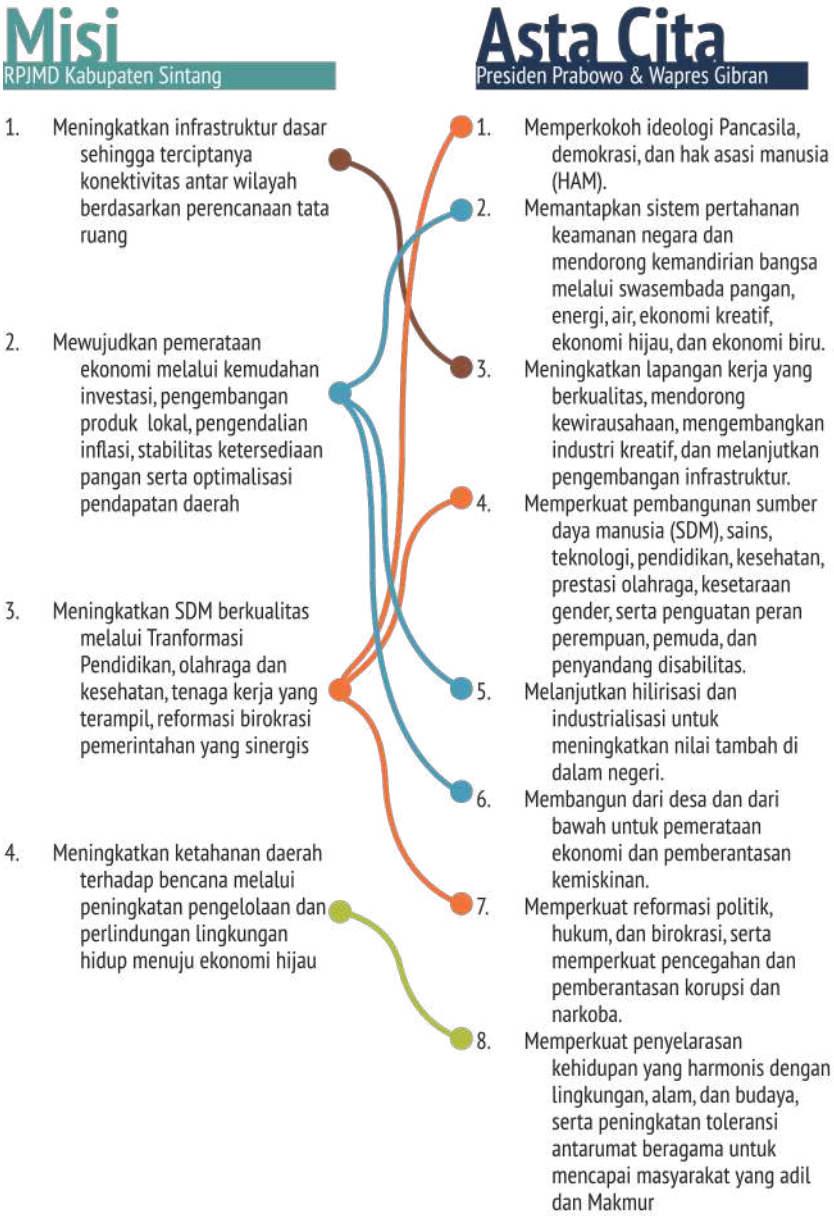
Meningkatkan SDM berkualitas melalui Tranformasi Pendidikan, olahraga dan kesehatan, tenaga kerja yang terampil, reformasi birokrasi pemerintahan yang sinergis

4

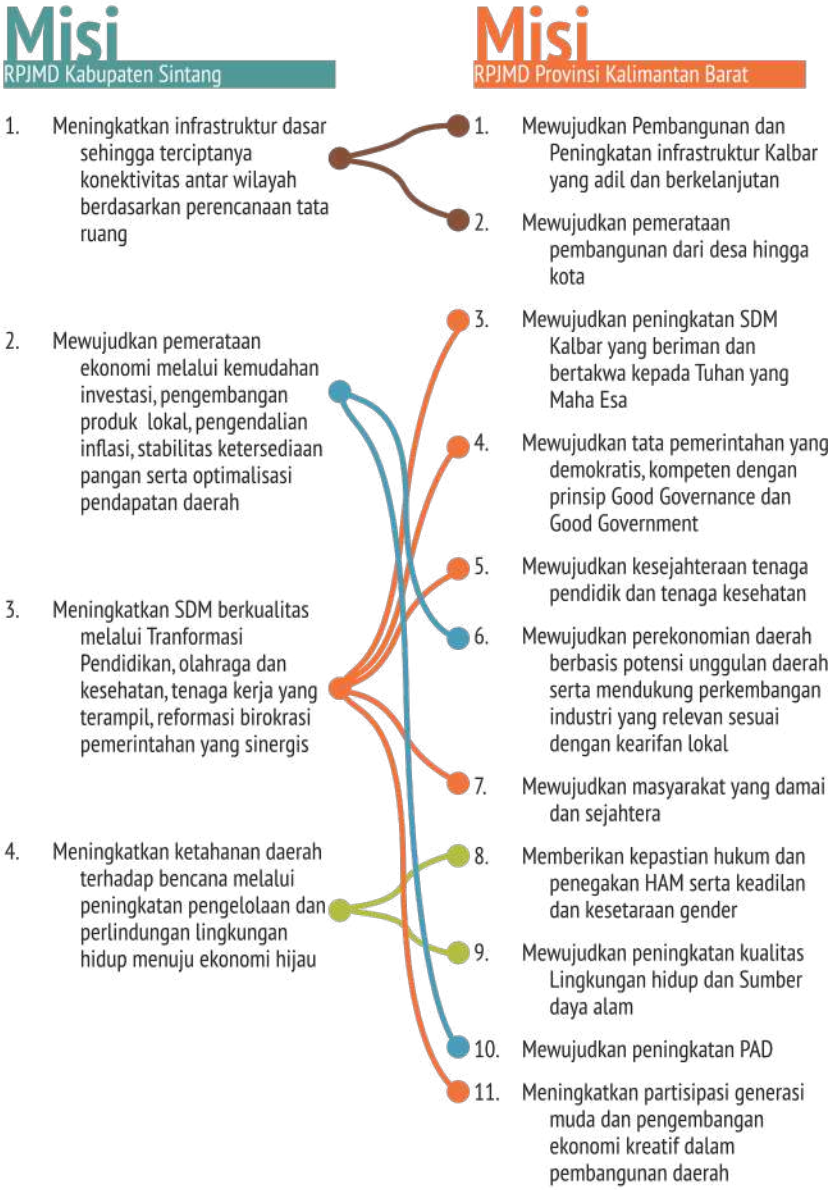
Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau



Keselarasan RPJMD Kabupaten Sintang dan RPJMN



Keselarasan RPJMD Kabupaten Sintang dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat



Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Misi 1

Meningkatkan infrastruktur dasar sehingga terciptanya konektivitas antar wilayah berdasarkan perencanaan tata ruang

Tujuan

Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Sasaran

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

Strategi	Arah Kebijakan
1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta. 2. Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu berbasis perencanaan tata ruang. 3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan. 4. Penguatan koordinasi pembangunan daerah dengan tata ruang wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi 5. Pembangunan infrastruktur berbasis desa untuk mendukung pemerataan pembangunan. 6. Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik. 7. Pengembangan infrastruktur sumber daya air dan energi terbarukan yang berkelanjutan. 8. Penguatan koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar kabupaten sintang menjadi lokus pembangunan	1. Meningkatkan kualitas jalan Strategis penghubung antar kecamatan dan Desa. 2. Mengembangkan sistem transportasi sungai yang terintegrasi dengan transportasi darat. 3. Memperluas akses air minum dan sanitasi layak di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. 4. Perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dengan pola tata ruang yang sesuai peruntukannya 5. Memenuhi kebutuhan energi listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik. 6. Mengembangkan infrastruktur TIK dan menghapus blank spot telekomunikasi di daerah terpencil. 7. Memperkuat infrastruktur mitigasi bencana terutama di kawasan rawan banjir dan kebakaran hutan 8. Mengembangkan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Misi 2

Mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas ketersediaan pangan serta optimalisasi pendapatan daerah

Tujuan

Meningkatnya ekonomi masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
2. Menurunnya pengangguran
3. Meningkatnya pemerataan ekonomi
4. Menurunnya kemiskinan daerah
5. Meningkatnya daya saing daerah

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. 3. Peningkatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. 4. Peningkatan daya saing potensi unggulan daerah. 5. Mempercepat rencana pembentukan BUMD Aneka Usaha. 6. Penguatan Perkebunan sawit rakyat 7. Penguatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal 8. Peningkatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	1. Menetapkan sentra pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi sentra pertumbuhan ekonomi tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung. 2. Meningkatkan investasi melalui promosi produk unggulan daerah dan inovasi percepatan layanan investasi. 3. Meningkatkan jumlah wirausaha baru, dan mengembangkan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders. 4. Meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah. 5. Pembentukan BUMD Aneka Usaha 6. Mendorong penguatan BUMD yang mandiri serta berdaya guna 7. Mendorong penguatan dan kemandirian kelompok tani/pekebun rakyat 8. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan pengembangan usaha pangan lokal 9. Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan 10. Meningkatkan metode pertanian berkelanjutan

Misi 3

Meningkatkan SDM berkualitas melalui Tranformasi Pendidikan, olahraga dan kesehatan, tenaga kerja yang terampil, reformasi birokrasi pemerintahan yang sinergis

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Terwujdunya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan sinergis

Sasaran

1. Meningkatkan masyarakat terdidik dan berkarakter
2. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
3. Meningkatkan daya beli masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah 2. Peningkatan kurikulum berbasis digital 3. Peningkatan pendidikan vokasi 4. Meningkatkan literasi masyarakat 5. Peningkatan disiplin pemeriksaan kehamilan 6. Peningkatan gizi balita 7. Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial	1. Meningkatkan partisipasi sekolah dengan WAJAR 131 Tahun 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang literasi 3. Meningkatkan ketersediaan perangkat lunak digital 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja 5. Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak 6. Perlindungan ibu dan anak 7. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial. 8. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan dari hulu ke hilir 9. Meningkatkan infrastruktur perlindungan dan jaminan sosial 10. Intervensi terhadap pengendalian inflasi serta mendorong penggunaan produk lokal
1. Peningkatan, pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintahan 2. Peningkatan OPD yang menerapkan pelayanan berdasarkan SPM 3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD 4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah 5. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan 6. Memfasilitasi terbentuknya Provinsi Kapuas Raya	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatkan persentase aparatur dengan kualifikasi sesuai bidang tugas 4. Meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik 5. Meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dengan membentuk struktur kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien serta membentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai kebutuhan pelayanan

Misi 4

Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau

Tujuan

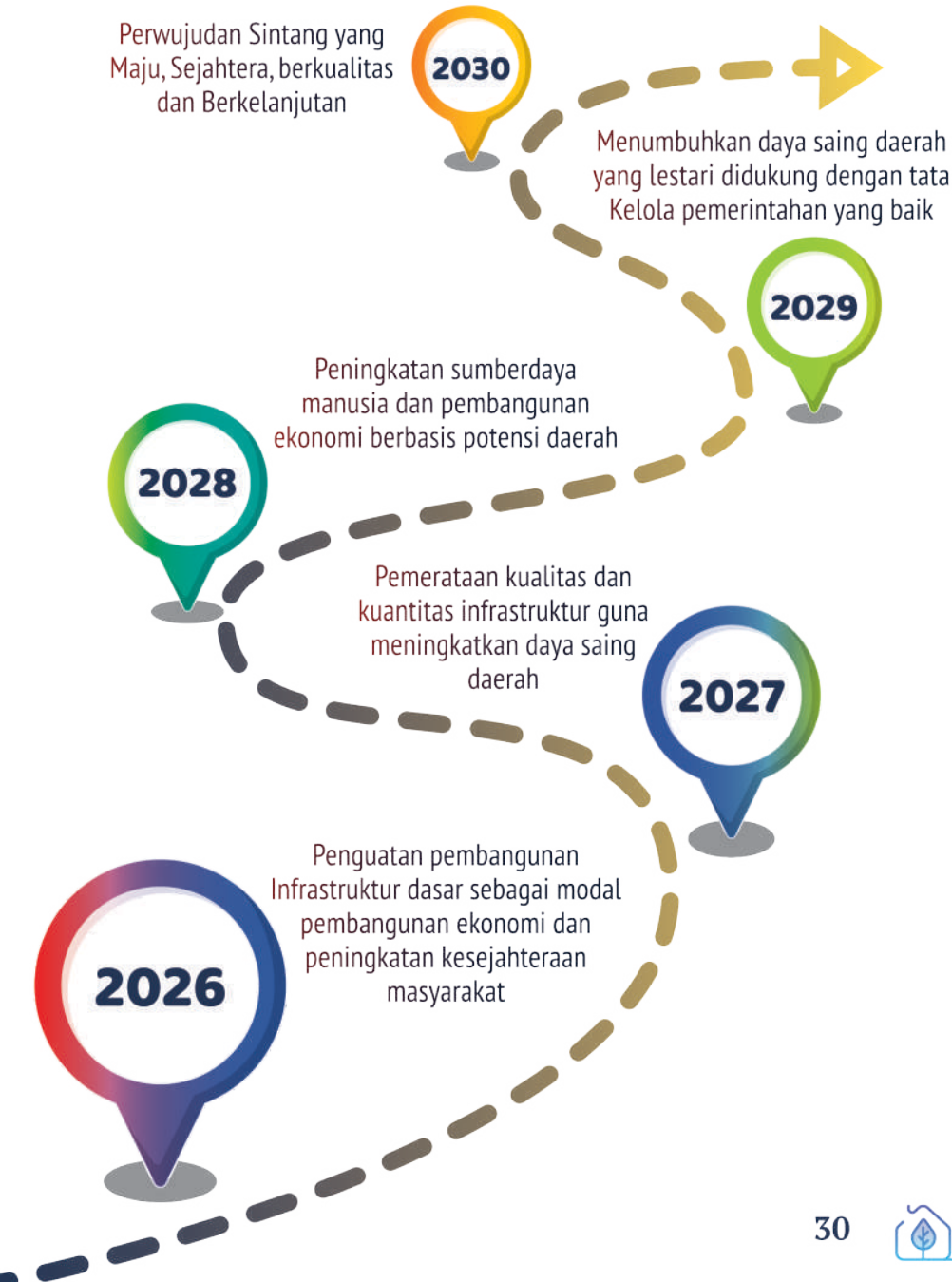
Meningkatnya resistensi terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran

Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana terutama masyarakat miskin termasuk dampak pasca bencana 2. Peningkatan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana 3. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya genetik (keanekaragaman hayati) 4. Peningkatan perlindungan ekosistem hutan 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya air 6. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup selaras alam 7. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam adaptasi perubahan iklim 8. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri 9. Peningkatan pengelolaan bahan kimia dan limbah terpapar ke udara, air dan tanah 10. Peningkatan akses sampah yang terkelola dengan baik 11. Peningkatan penggunaan energi terbarukan	1. Meningkatkan metode upaya pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2. Meningkatkan layanan respon kebakaran dan bencana 3. Meningkatkan infrastruktur penanganan bencana 4. Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem dan spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup 5. Meningkatkan program bersama mitra pembangunan 6. Penguatan masyarakat adat dalam pelestarian perhutanan sosial dan lingkungan 7. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin usaha 8. Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan sampah 9. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada daerah potensi

Pentahapan Kebijakan Pembangunan Daerah



Program prioritas pembangunan disusun untuk memastikan arah kebijakan yang telah dirancang sesuai dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1. **Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur**
   - 9 program prioritas, yang mengakomodir upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan kawasan

2. **Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.**
   - 6 program prioritas, yang terkait dengan peningkatan sumber daya alam, ekonomi dan UMKM

3. **Sasaran : Menurunnya pengangguran**
   - 3 program prioritas, berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja dan pendidikan

4. **Sasaran : Meningkatnya pemerataan ekonomi**
   - 1 program prioritas, yaitu pemberdayaan UMKM

5. **Sasaran : Menurunnya kemiskinan daerah**
   - 4 program prioritas, berkaitan dengan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial

6. **Sasaran : Meningkatnya daya saing daerah**
   - 4 program prioritas, yaitu terkait program penanaman modal, ekonomi kreatif dan riset

7. **Sasaran : Meningkatkan masyarakat terdidik dan berkarakter**
   - 4 program prioritas, yaitu berupa program-program kependidikan dan perpustakaan

8. **Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan**
   - 4 program prioritas, yaitu terkait program-program peningkatan kualitas layanan kesehatan

9. **Sasaran : Meningkatkan daya beli masyarakat**
   - 3 program prioritas, yang berkaitan program-program stabilisasi harga, UMKM dan tenaga kerja

10. **Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital**
    - 5 program prioritas, yaitu berkaitan penguatan kapasitas SDM, penguatan perencanaan, penganggaran dan teknologi informasi

11. **Sasaran : Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana**
    - 7 program prioritas, berkaitan program kebencanaan dan lingkungan

04

KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH



Dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025–2029, program perangkat daerah disusun sebagai panduan kerja bersama. Setiap perangkat daerah menyiapkan program dan target kinerja pelayanan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan. Melalui rancangan ini, terlihat pembagian peran yang memastikan pelayanan publik berjalan terukur dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, kinerja pembangunan juga diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Ketiga instrumen ini menjadi acuan dalam menilai capaian program secara obyektif, sekaligus memberikan gambaran sejauh mana pelayanan publik dapat memenuhi sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Indikator Sasaran dan Tujuan RPJMD

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Kabupaten Sintang yang Maju Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	Meningkatnya infrastruktur daerah	**Indeks Infrastruktur**	
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur
Kabupaten Sintang yang Sejahtera Mewujudkan Pemerataan Ekonomi melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah	Meningkatnya ekonomi masyarakat	**Pertumbuhan Ekonomi**	
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB per Kapita
		Menurunya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya pemerataan ekonomi	Indeks Gini (Gini Ratio)
		Menurunnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Sintang yang berkualitas Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Trampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis	Meningkatnya kualitas SDM	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	
		Meningkatnya Masyarakat Terdidik dan Berkarakter	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan sinergis	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Indeks SPBE
		Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Sintang yang berkelanjutan Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menuju Ekonomi Hijau	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	**Indeks Resiko Bencana**	
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Utama

No.	IKU	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Infrastruktur	Angka	48,95	49,89	51,16	52,26	53,42	54,62	55,87
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,02	5,46	5,65	5,78	5,84	5,96
3	PDRB per Kapita	Ribu rupiah	46,17	47,57	53,00	56,71	59,23	61,26	63,47
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,85	2,82	2,8	2,76	2,72	2,7	2,67
5	Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0,329	0,31	0,285	0,282	0,27	0,265	0,265
6	Angka Kemiskinan	%	8,03	7,85	7,3	7	6,75	6,53	6,1
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,57	3,62	3,7	3,75	3,85	4,00	4,2
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,13	70,25	70,45	70,79	71,00	71,21	71,47
9	Indeks Pendidikan	Angka	0,62	0,63	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67
10	Indeks Kesehatan	Angka	0,84	0,88	0,9	0,92	0,94	0,96	0,98
11	Pengeluaran Perkapita	Ribu rupiah	9.657	9.720	9.821	9.930	9.959	9.989	10.021
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69,24 (B)	70,24 (BB)	72,31 (BB)	74,21 (BB)	76, 65 (BB)	78,30 (BB)	79,87 (BB)
13	Indeks SPBE	Angka	2,3	2,85	2,96	3,00	3,15	3,37	3,51
14	Indeks Inovasi Daerah	Angka	41,85	45,27	50,39	55,76	59,21	65,67	68,46
15	Nilai SAKIP	Angka	60,57 (B)	65,30 (B)	70,00 (B)	74,68 (BB)	78,30 (BB)	80,02 (BB)	81,45 (A)
16	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,61	3,76	3,92	4,09	4,27	4,46	4,64
17	Indeks Resiko Bencana	Angka	123,96	122,47	121	119,55	118,12	116,76	115,3
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	70,63	79,3	79,46	79,61	79,77	79,93	80,13

IKK

Indikator Kinerja Kunci RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci merupakan outcome kinerja Program yang ada di setiap Perangkat Daerah. Indikator ini disajikan menurut OPD dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan OPD.

1 IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan : Pendidikan

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Anak Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah (APS)	%	58,3	61,9	68,09	74,9	82,39	90,63
Indeks Pemerataan Guru	%	0,59	0,62	0,69	0,72	0,78	0,81
Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	46,27	47,17	49,08	50,11	51,09	51,78
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	%	100	100	100	100	100	100

Urusan : Kebudayaan

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	50	54	59	65	69	75
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	45	47	51	56	60	65
Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	47	51	55	59	64	60
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	40	44	49	51	56	60
Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	%	49	54	59	65	69	74

2 IKK Dinas Kesehatan

Urusan : Kesehatan

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	151	142	126	110	96	96
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	%	29,5	26,2	23,8	21,4	19,00	16,6
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pasien yang mendapat layanan tingkat lanjut sesuai standar	%	85	87	90	92	95	95

3 IKK Dinas Pekerjaan Umum

Urusan : Pekerjaan Umum dan Penatapan Ruang

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Kemantapan Jalan	%	12,56	13,68	15,08	16,65	18,33	20,12
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	30,86	31,66	32,45	33,18	33,91	34,63
Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	10,43	13,13	17,34	21,54	25,74	29,94
Persentase Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli	%	41,5	42	43	45	47	48,5

4 IKK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Rumah tangga Berakses Air Minum	%	53,56	55,28	56,38	57,56	58,80	60,11
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	%	71,58	72,94	74,94	76,94	78,94	80,94
Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi Baik	%	61	62	64	68	69	71
Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	68,04	69,04	71,04	73,04	75,04	77,04
Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi Baik	%	24,24	26,24	29,24	32,24	35,24	38,24
Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan	%	59,4	59,7	60,29	60,9	61,5	62,12

Urusan : Perumahan dan Kawasan Permukiman

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	0	0	0	0	0	0
Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	12,21	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2

5 IKK Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	%	53	55	60	65	70	75

Urusan : Pertanahan

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat Yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	53	55	60	65	70	75
Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100

6 IKK Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan : KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
Persentase PPNS yang Ditingkatnkan Kompetensinya	%	0	25	25	25	25	25

7 IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Urusan : KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	25,4	28,6	35,7	42,9	50,0	57,1

8 IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan : KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	40	45	50	55	60	65
Persentase Penangan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	27	30	35	40	45	50

9 IKK Dinas Sosial

Urusan : SOSIAL

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	60,50	61,00	61,50	62,00	62,50	63,00
Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya	%	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	85	86	87	88	89	90
Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	76,15	76,65	77,15	77,65	78,15	78,65
Presentase Penerima Manfaat Yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	76,25	76,65	77,15	77,65	78,15	78,65
Presentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	50,3	50,5	51	51,5	52	52,5
Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiapsiagaannya	%	21,53	22,63	25,43	28,35	30,19	32,43
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100

10 IKK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan : TENAGA KERJA

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Penyelesaian Dokumen Rencana ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100	96,5	96,75	97	97,15	97,5
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	20,25	20,5	20,75	30	30,25	30,5
Persentase Pekerja pada Perusahaan yang diberikan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	100	100	100	100	100	100

Urusan : TRANSMIGRASI

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	%	97,35	97,5	97,65	97,75	97,85	97,85
Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	80	84,75	85	85,25	85,5	85,75

11 IKK Dinas Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	61,52	61,54	62	62,15	62,15	62,4
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	100	100	100	100	100
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	77	80	80	85	90	90
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100

Urusan : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)	Angka	2,25	2,23	2,21	2,19	2,13	2,1
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Angka	40,5	40,3	40,1	39,9	39,7	39,5
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	%	67	66,5	66	65,5	65	64,8
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	%	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100

12 IKK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Urusan : PANGAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%		7,11	7,82	8,6	9,49	10,41
Skor Pola Pangan Harapan	Skor		90,8	92,3	94,02	95,84	97,87
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%		12,22	11	9,78	8,56	7,33
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%		78	80	82	86	88

Urusan : KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Thn		281	293	300	315	320
Produksi Perikanan Budidaya	Kg PER-KAPITA PER-TAHUN		940	951	959	963	1065
Angka Konsumsi Ikan	%		54,28	55,18	56,21	57,29	58,51

13 IKK Dinas Lingkungan Hidup

Urusan : LINGKUNGAN HIDUP

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Air	Nilai	73,66	73,76	73,96	74,16	74,36	74,56
Indeks Kualitas Udara	Nilai	84,11	84,21	84,41	84,61	84,81	84,51
Persentase RTH	%	30	30	30	30	30	30
Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	35	35,5	37	38	39	40
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH	%	66	66,25	66,5	66,75	67	67,5
Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	25	25	30	30	35	35
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	25	25	30	30	35	35
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	15	20	20	30	30	30
Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Nilai	65	66	67	68	69	70

14 IKK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	1,8	2	2,3	2,6	2,9	3,2
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	22,7	23	23,5	24	24,5	25
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100

15 IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Urusan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	62,5	63	64	65	66	67
Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	75,5	76	77	78	79	80
Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	4,99	5,14	6	6,85	7,71	7,71
Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	80,49	82,05	84,62	87,18	89,74	89,74
Persentase PKK aktif	%	76,02	76,42	76,92	77,42	77,92	77,92
Persentase posyandu aktif	%	58,24	58,54	59,04	59,54	60,04	60,04

16 IKK Dinas Perhubungan

Urusan : PERHUBUNGAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Konektivitas Darat	%	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28
Konektivitas Sungai	%	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58

17 IKK Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	87	88	89	90	91	92
Nilai layanan Administrasi Pemerintah Berbasis elektronik (Penilaian Indeks SPBE)	Angka	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6

Urusan : STATISTIK

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	3

Urusan : PERSANDIAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks KAMI		485	500	520	550	580	600

18 IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Urusan : KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	1,46
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	14	14,21	15,3	16,39	17,49	18,58
Persentase Koperasi Aktif	%	49,60	50	50,79	51,59	52,38	53,17
Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	23,50	24,59	25,68	26,78	27,32	28,42
Persentsse Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	48,50	49,18	50,82	52,46	54,1	55,74
Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan pinjam	%	21	23,81	28,57	33,33	35,71	38,1
Persentase Usaha Mikro	%	14	14,93	16,41	17,9	19,38	20,87
Pertumbuhan Wirausaha	%	19,87	20,7	21,95	23,19	24,43	25,67

Urusan : PERDAGANGAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	4,74	5,61	7,48	9,35	11,21	13,08
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	67,67	69,23	71,79	74,36	76,92	79,49
Persentase Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43
Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar	-200.10	-120,37	-3,63	127,63	251,63	375,63
Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	100	100	100	100	100

Urusan : PERINDUSTRIAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cakupan bina Kelompok Pengrajin	%	35	35	35	35	35	35
Persentase Izin Usaha Industri yang ditertbitkan	%	10	10	10	10	10	10
Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, Akurat, dan Terkini	%	100	100	100	100	100	100

19 IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan : PENANAMAN MODAL

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	%	95	95	95	100	100	100
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Kerja sama Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100

20 IKK Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Urusan : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio Wirausaha Pemuda	%	28	28	29	29	30	30
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	30	30	31	32	32	33
Cakupan Pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100

Urusan : PARIWISATA

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata	%	10,2	10,5	10,7	11	11,2	11,5
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	25	25	25	26	27	27
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	10,34	10,35	10,36	10,37	10,38	10,4

21 IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan : PERPUSTAKAAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	80,85	81,75	83,38	85,04	86,74	88,47
Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang dimiliki	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	%	100	100	100	100	100	100

Urusan : KEARSIPAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Ketersediaan Arsip	%	76,30	77,37	79,06	81,1	83,34	85,49
Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	6,5	7,5	9,25	11,45	13,38	15,2
Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	%	6,1	7,15	9,2	11,25	13,35	15,45
Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	74,4	75	77,2	77,9	78,1	78,46

22 IKK Dinas Perkebunan dan Peternakan

Urusan : PERTANIAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Produksi Perkebunan	%	64	66	69	72	75	78
Peningkatan Produktivitas Perkebunan	%	64	66	69	72	75	78
Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	3,5	4,1	5,5	6,9	8,3	9,7
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	73	75	80	85	90	95
Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	40	45	55	65	75	85

23 IKK Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Urusan : PERTANIAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	90	90	90	90	100	100
Peningkatan Produksi Holtikultura	%	90	90	90	90	100	100
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ton	50.434	50.434	51.434	51.434	51.500	51.500
Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	90	90	90	90	100	100
Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	90	90	90	95	100	100
Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	90	90	90	90	100	100
Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	90	90	90	90	100	100
Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk	%	91	92	93	94	95	96

24 IKK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan : PERENCANAAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	70,41	70,41	71,01	72,19	72,78	73,37
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktuyr dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100

25 IKK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan : KEUANGAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	35	34	33	32	31	30
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	30,5	31	32	33	34	40
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Penurunan SILPA	%	12,5	11	10	9	8	9
Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2,5	3	4	5	6	7

26 IKK Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Urusan : KEUANGAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,02	9,52	10,07	10,67	11,32	11,97
Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan berbasis digital	%	71,44	72,44	74,44	76,44	79,44	83,44

27 IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Urusan : KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan formasi	%	87,5	88	88	89	90	92
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,9
Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	7,90	8	8,25	8,5	8,75	9
Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	16	18	23	28	33	40
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	11,51	11,52	11,53	11,54	11,55	15
Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	62	63	66	69	72	75
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	4,8	5	5,5	6	6,5	8

28 IKK Badan Riset dan Inovasi Daerah

Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	88	90	94	97	100	100
Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	44	45	55	65	70	75

29 IKK Inspektorat

Urusan : PENGAWASAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	91,5	92,6	94,2	95,8	97,4	99
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,33	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,10	3,16	3,24	3,32	3,42	3,5

30 IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan : PEMERINTAHAN UMUM

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	40,8	41,5	43,5	44,5	45,5	50,5
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	78,5	79,5	80,5	83,5	85,5	87,5
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	45,5	50,5	55,5	65,5	70,5	75,5
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	68	70	75	80	85	90
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

31 IKK Sekretariat Daerah

Urusan : SEKRETARIAT DAERAH

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kematangan Organisasi	Kategori	85,55	85,65	85,85	86	86,55	88,5
Persentase Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan secara efektif	Kategori	100	100	100	100	100	100
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kategori	2,68(Sedang)	2,70(Sedang)	2,74(Sedang)	2,78(Sedang)	2,82(Sedang)	2,85(Sedang)
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100
Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persen	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9

32 IKK SEKRETARIAT DPRD

Urusan : SEKRETARIAT DEWAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	80	80	85	85	89	90
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	80	80	85	85	90	90

33 IKK Badan Pengelola Perbatasan

Urusan : PENGELOLAAN PERBATASAN

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)	Indeks	0,6113	0,6153	0,6203	0,6283	0,6365	0,6757

34 IKK Kecamatan

Urusan : Kecamatan

IKK	Satuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Layanan yang ditindaklanjuti	%	71,87	72,03	75,65	78,44	81,69	84,74
Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan	%	76,19	76,39	78,58	81,08	83,55	85,66
Persentase Pembinaaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	72,01	73,04	75,82	79,29	82,50	86,36
Persentase Jumlah Konflik yang difasilitasi	%	94,2	95,07	96,21	97,36	98,50	99,29
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	77,5	78,43	81,07	83,79	86,22	89,05

PENUTUP

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Sintang dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi DPRD Kabupaten Sintang dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang dalam periode 2025-2029.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sintang mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama menyukseskan dan mengawal terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi sumber daya yang dimiliki.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 sangat tergantung dari komitmen, koordinasi, sinergi, dan peran aktif seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya.


RPJMD
KABUPATEN
SINTANG
TAHUN 2025 - 2029
DOWNLOAD
RPJMD LENGKAP
DI SINI



BAPPEDA
Kabupaten Sintang

PRIMA